

Judul : Calon Hakim Agung terpilih dituntut pulihkan marwah MA
Tanggal : Rabu, 17 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

SELEKSI HAKIM MA

Calon Hakim Agung Terpilih Dituntut Pulihkan Marwah MA

JAKARTA, KOMPAS — Para calon hakim agung yang telah dipilih oleh Komisi III DPR diharapkan dapat memulihkan marwah Mahkamah Agung yang kini terdredah kasus-kasus korupsi. Tidak hanya bekerja secara profesional, para calon hakim agung juga dituntut menjaga integritas dan independensi karena mereka merupakan benteng terakhir rakyat dalam mencari keadilan.

Komisi III DPR, Selasa (16/9/2025), menetapkan sembilan calon hakim agung dan satu calon hakim agung *ad hoc* HAM lolos uji kelayakan dan keputusan. Tiap tiap calon hakim agung itu mendapatkan suara penuh dari delapan fraksi di Komisi III DPR. Tidak ada calon yang diperdebatkan sehingga rapat pleno di ruang rapat Komisi III DPR itu berjalan mulus.

Calon hakim yang lolos uji kelayakan dan keputusan itu adalah Suradi yang menempati kamar pidana, Ennid Hasanuddin (kamar perdata), Heru Pramono (kamar perdata), dan Lailatul Arofah (kamar agama). Selain itu, Muhyah (kamar agama), Hari Sugiharto (kamar tata usaha negara), Budi Nugroho (kamar TUN/pajak), Diana Malemita Ginting (kamar TUN/pajak), serta Agustinus Purnomo Hadi (kamar militer). Adapun calon hakim *ad hoc* HAM yang lolos adalah Moh Pughu Haryogi.

"Hasil persetujuan ini akan dilaporkan di rapat paripurna (terakhir) untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua Komisi III DPR Habiburrahman setelah menanyakan persetujuan para peserta rapat.

Sebelumnya, Komisi III DPR menguji kelayakan dan keputusan 13 calon hakim agung dan tiga calon hakim agung *ad hoc* HAM. Namun, Komisi III hanya meloloskan sembilan calon hakim agung dan seorang calon hakim agung *ad hoc* HAM setelah mempelajari rekam jejak dan mendalami gagasan dan pemikiran para calon dalam uji kelayakan dan keputusan.

Meskipun tak ada perdebatan dan pertentangan dalam pengambilan persetujuan,



UMPAS KOMPAS.COM/RI/2025/09/17

Para anggota Komisi III DPR bertepuk tangan setelah palu keputusan diketuk dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Calon Hakim Agung di Ruang Rapat Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

fraksi-fraksi menekankan kepada para calon hakim agung yang terpilih untuk menjaga integritas. Bahkan, perwakilan fraksi yang membacakan pilihan mereka juga tetap meminta para calon untuk memperbaiki nama baik MA yang terdredah kasus-kasus korupsi.

lam lima tahun terakhir. Kasus-kasus tersebut menjadi pelajaran bagi DPR untuk lebih selektif dalam menentukan para hakim yang duduk di kursi tertinggi peradilan tersebut.

"Jangan sampai kita mengulang kembali kesalahan dengan memilih calon yang tidak amanah. Uji kelayakan ini tak hanya soal kecapaian hukum, tapi yang lebih utama integritas dan moralitas," ujarnya.

Oleh karena itu, Abdullah ingin para calon hakim agung yang telah disetujui Fraksi PKB dapat bekerja profesional dan menjaga independensi. Dia juga menekankan MA sebagai benteng terakhir rakyat dalam mencari keadilan.

Fraksi PKB meyakini, dengan peningkatan moralitas dan profesionalitas para hakim agung, MA bisa kembali jadi institusi yang dipercaya publik. "Jadi hakim adalah amanah besar. Bahaya menjadi hakim sangat besar karena godaan kekuasaan dan siap bisa menjerumuskan. Karena itu, integritas mutlak diperlukan," ujar Abdullah.

Hakim terjerat korupsi

Seleksi dilanjutkan uji kelayakan dan keputusan calon hakim agung dilaksanakan menyusul permintaan MA agar KY segera mengisi kekosongan 17 kursi hakim agung serta tiga hakim *ad hoc* HAM. Permintaan itu mencakup 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim *ad hoc* HAM.

Dengan kesepakatan di Komisi III, itu berarti masih ada delapan kursi hakim MA yang kosong. Selain itu, masih ada dua kursi hakim agung *ad hoc* HAM yang kosong.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hince Panjaitan, juga berharap para calon hakim agung terpilih bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MA. Menurut dia, para hakim agung adalah harapan agar MA menjadi lebih baik. Terlebih, para hakim agung merupakan ben-

teng keadilan di negeri ini.

Hince juga mengingatkan para hakim agung agar menjaga integritas. Pesan itu disampaikan karena banyak hakim agung yang terjerat kasus korupsi. Menurut dia, sedikitnya 39 hakim terjerat korupsi dalam 15 tahun terakhir. Sebanyak 31 hakim agung ditangkap KPK, dan delapan lainnya disidik oleh Kejaksaan Agung.

Secara terpisah, peneliti Centra Initiative, Erwin Natosmal Oemar, mengatakan, dari para calon hakim agung yang terpilih, belum ada sosok yang dapat mendorong perubahan di internal MA. Berdasarkan latar belakang, sebagian besar kandidat masih berasal dari lingkungan peradilan.

Ia mengingatkan, calon hakim agung harus mampu keluar dari politik balas budi ke parlemen. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi internal MA. Ketua MA juga perlu memastikan agar hakim-hakim baru dapat mengikuti agenda serta kultur reformasi peradilan yang telah dicanangkan.

(RTG: BOW)